

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang memiliki tujuan dalam menaikkan pendapatan riil negara dan memoderasi kelompok organisasinya (Budiana 2016). Tujuan dari upaya tersebut yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang dapat diukur melewati berbagai indikator ekonomi salah satunya keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran membuat lapangan kerja membuat pengangguran dan inflasi juga rendah dan pendapatan nasional yang tinggi (Kurniawan, 2013). Ekonomi merupakan sasaran pembangunan negara dan tantangan yang perlu diatasi.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu masalah dalam perekonomian baik di negara berkembang maupun negara maju oleh karena itu bisa dilakukan dan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Peningkatan pengangguran paling sering terkait dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang terserap yang dapat menyebabkan masalah pengangguran. Dalam beberapa negara berkembang pertumbuhan ekonomi tidak mampu menghasilkan lapangan kerja dengan kecepatan yang cukup untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk.

Situasi yang ada di beberapa negara berkembang dalam beberapa waktu pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengikuti pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya pengangguran menjadikan masalah serius dari tahun ke tahun (Sukirno, 2016). Pengangguran menjadikan problem sosial serta ekonomi dan

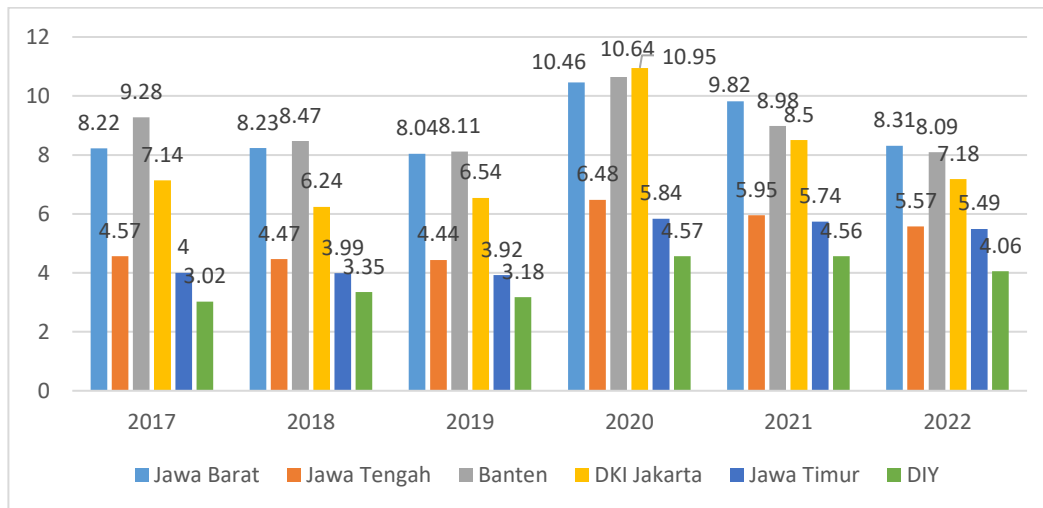
turunnya pendapatan yang menjadikan pengangguran mengurangi konsumsi mereka (Sukirno, 2016).

Sebagai salah satu provinsi yang banyak penduduknya di Indonesia, Jawa Timur bisa membuat lapangan pekerjaan dikarenakan banyaknya penduduk usia produktif. Namun, jika tidak diimbangi dengan langkah-langkah yang tepat, angka pengangguran cenderung meningkat setiap tahun. Menurut data BPS Jawa Timur, penduduk provinsi Jawa Timur mencapai 41,15 juta jiwa. Tingkat pengangguran juga menjadi indikator penting kinerja ekonomi, mencerminkan presentase angkatan kerja yang tidak bekerja.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (2018) mencatat bahwa populasi dunia yang tinggal di perkotaan saat ini lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan, mencapai 55 persen. Proyeksi menunjukkan bahwa populasi kota global diperkirakan akan meningkat sebesar 68 persen pada tahun 2050. Fonomena ini terkait erat dengan ekonomi aglomerasi, dimana pusat kegiatan ekonomi di kota menciptakan lebih banyak peluang pekerjaan daripada di desa.

Namun, migrasi dari desa ke kota juga membawa risiko, terutama ketika jumlah migran melebihi lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan surplus tenaga kerja yang berkelanjutan di kota, dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Provinsi Jawa Timur terdapat 29 Kabupaten dan 9 Kota, kota-kota di Jawa Timur meliputi Kota Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Probolinggo, serta Surabaya. Kesempatan kerja yang lebih tinggi, kota seringkali menjadi alasan migrasi dari Desa ke Kota, Tetapi justru menjadikan permasalahan untuk pemerintah dalam membuat lapangan pekerjaan. Tabel

dibawah ini menunjukkan pengangguran yang ada di Pulau Jawa tahun 2017 sampai 2022.



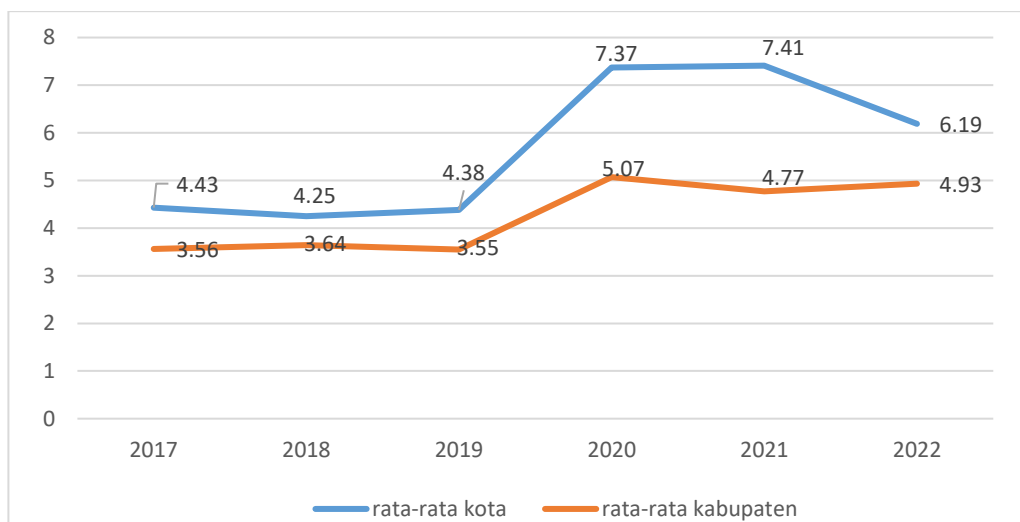
Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2017-2022

Sumber: *BPS Jawa Timur*

Pada gambar tersebut terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat pengangguran yang menempati peringkat kelima terbesar di Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Timur terjadi fluktuasi setiap tahunnya. Meskipun fluktuasi tersebut tidak tetep, terdapat tahun dengan tingkat pengangguran yang tinggi khususnya pada Tahun 2020 mencapai 5,84 persen.

Hingga saat ini pengangguran menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan. Jumlah pencari kerja dan penambahan kesempatan kerja tidak sejalan. Selain itu, kondisi lapangan kerja kurang mendukung, dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja. Terutama di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan angkatan kerja meningkat setiap tahunnya, sementara peluang kerja terbatas sehingga tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja. Akibatnya,

tingkat pengangguran terbuka tetap mengalami fluktuasi meskipun tidak signifikan setiap tahunnya di Provinsi Jawa Timur. Dampak dari tingginya pengangguran terbuka tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik. Penelitian ini akan meneliti beberapa faktor-faktor yang akan diteliti seperti Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum.

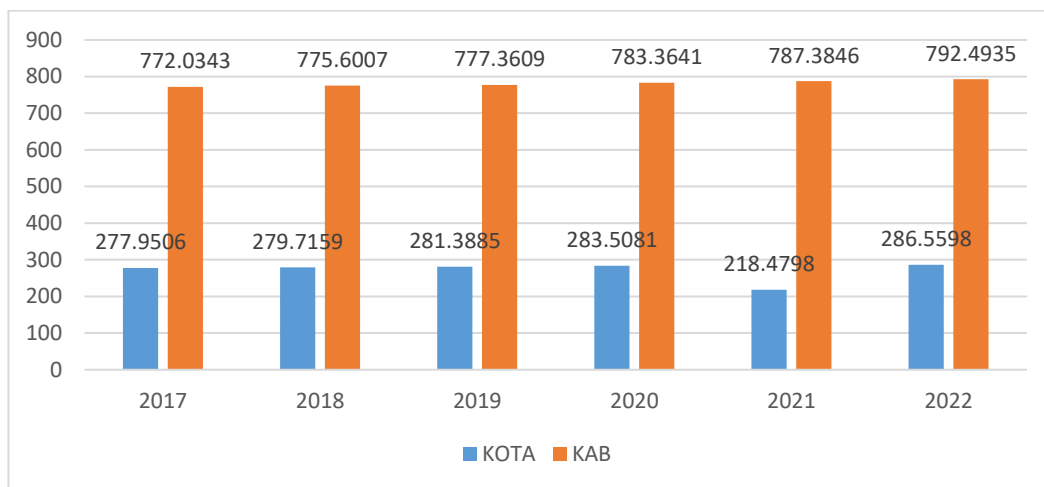


Gambar 1.2 Perbandingan Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Perkotaan dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Sumber: *BPS Jawa Timur*

Grafik 1.2 menjelaskan bahwa perbandingan tingkat pengangguran terbuka di Kota lebih tinggi di bandingkan dengan di Kabupaten, tingkat pengangguran terbuka di Kota yang paling tinggi berada pada tahun 2021 dengan angka sebesar 7,41 persen. Perbandingan daerah Kota dengan Kabupaten bertujuan untuk mengetahui lebih tinggi mana tingkat pengangguran di Kota atau Kabupaten. Kota memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dan potensi ekonomi yang lebih

merata di perdagangan, industri, dan pertanian walaupun memiliki tingkat pengangguran tinggi di bandingkan Kabupaten. Infrastruktur yang lebih canggih di Kota menciptakan peluang untuk menjadi pusat industrialisasi yang lebih berkembang, dengan harapan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan saat ini, tingkat pengangguran di Kota cenderung lebih tinggi karena banyaknya migrasi dari Desa ke Kota, yang tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang ada sehingga menyebabkan ketidakseimbangan.

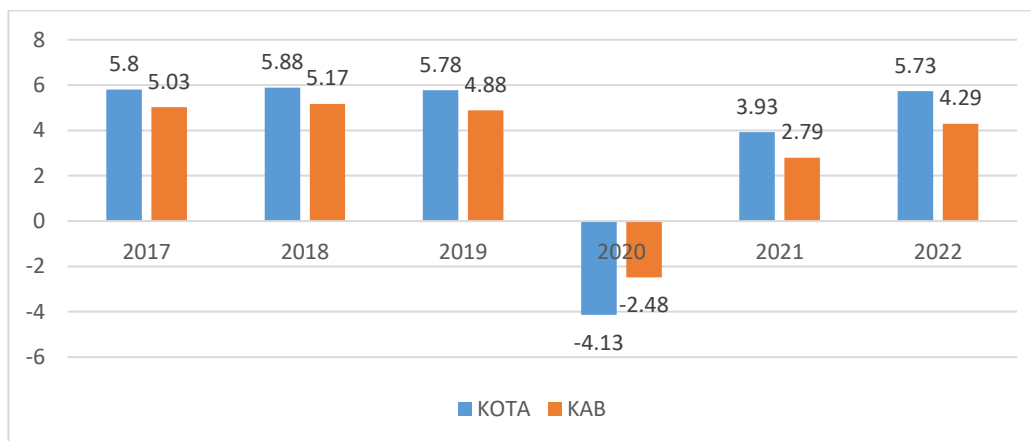


Gambar 1.3 Rata-rata Jumlah Penduduk di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Sumber: *BPS Jawa Timur*

Gambar 1.3 menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kota lebih rendah dibandingkan dengan di Kabupaten, meskipun tiap tahun tidak selalu menurun tetapi Jumlah Penduduk Di Kota mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah Penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2021 dengan Jumlah angka 218,4798 Jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan Jumlah angka

286,5598 Jiwa. Ahmad & Khan (2018) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dengan tingkat pengangguran.. Sedangkan Lindiarta (2014) jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengangguran. Menurut Teori Malthus Jumlah Penduduk terdapat pengaruh positif dan signifikan yang artinya jika jumlah penduduk naik, maka tenaga kerja juga naik. Tetapi jika penambahan tenaga kerja tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja yang ada, maka orang-orang akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dan bagi yang tersisih dalam persaingan tersebut, maka akan menjadi pengangguran. Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kota mengalami fluktuasi setiap tahunnya, begitu juga dengan tingkat pengangguran. Keadaan ini tidak sejalan dengan Teori Malhus, sehingga dengan adanya gap teori dan gap penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan, maka perlu dilakukan analisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran.



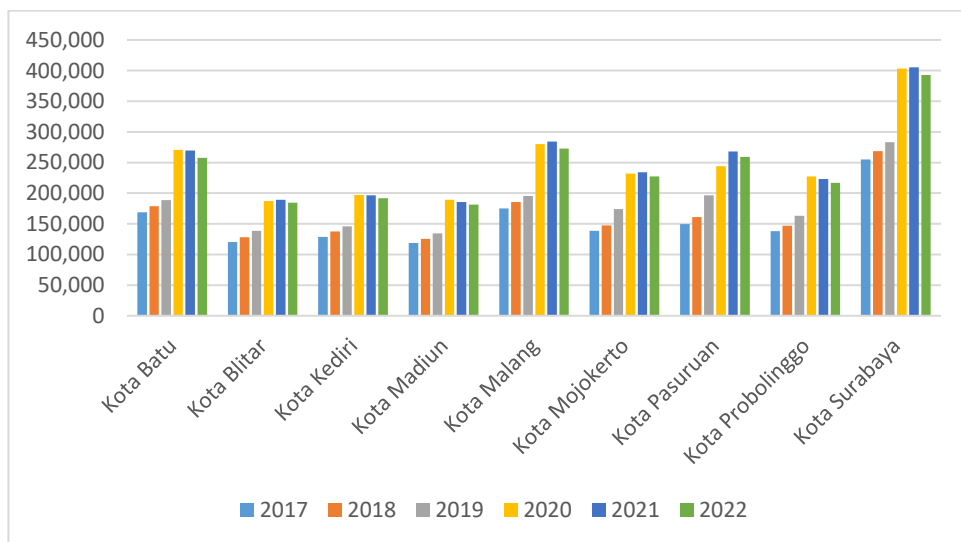
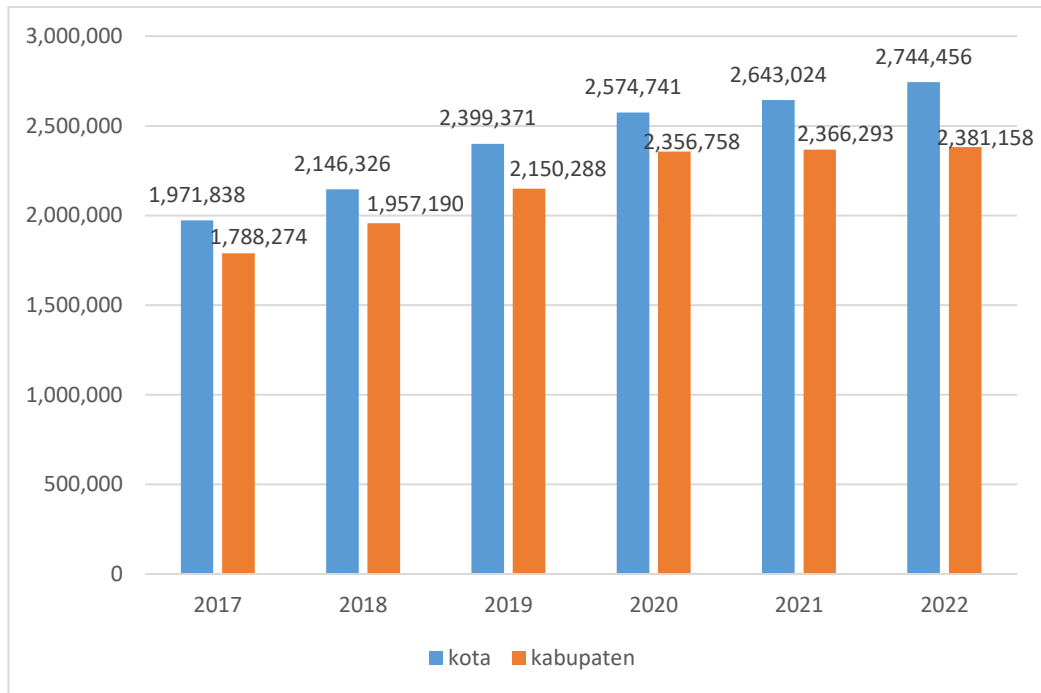
**Gambar 1.4 Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota dan Kabupaten
Provinsi Jawa Timur**

Sumber: *BPS Jawa Timur*

Grafik 1.4 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota-kota Provinsi Jawa Timur fluktuasi dari tahun ke tahun. Saat tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan signifikan sebesar 04,13 persen. Menurut Syahril (2014) dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, penelitian memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sebaliknya penelitian oleh Wijayanti (20014) memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif meskipun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Teori Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan pengaruh negatif yang artinya bisa mengurangi pengangguran. Sedangkan pada kenyataan yang ada pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran pada saat ini fluktuasi dari tahun ke tahun, sehingga dengan adanya gap teori dan gap penelitian terdahulu perlu dilakukan analisis mengenai analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.

Penyebab terakhir dari tingginya pengangguran adalah Upah. Tingkat upah merupakan faktor yang menyatukan kepentingan kedua pihak antara produsen dan pekerja. Menurut Panjawa dan Soebagiyo, upah dianggap sebagai komponen biaya produksi yang perlu dikendalikan dengan efisiensi. Sementara bagi pekerja, upah bukan hanya sebagai sumber penghasilan pribadi, tetapi juga memberikan dukungan finansial untuk keluarga dan memainkan peran penting sebagai sumber pengeluaran dalam masyarakat. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan Upah Minimum Kota (UMK) di berbagai Kota dan

Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.5 Rata-rata Tingkat UMK dan Upah Riil di Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Sumber: *BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Probolinggo*

Berdasarkan rata-rata UMK Kabupaten dan Kota serta Upah riil di daerah

perkotaan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2017 hingga 2022 pada gambar di atas memberikan hasil bahwa Kota memiliki rata-rata UMK dan Upah riil yang lebih tinggi di dibandingkan dengan Kabupaten. Upah riil dalam penelitian ini yakni Indeks Harga Konsumen dibagi dengan UMK. Untuk mengetahui Indeks Harga Kosumen yang ada di daerah Perkotaan Provinsi Jawa Timur untuk Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan, masing-masing Indeks Harga Konsumennya mengacu pada daerah yang paling terdekat dan potensial yang ada di wilayah tersebut, selebihnya mengacu pada daerah kota masing-masing. Menurut penelitian terdahulu dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan oleh Wijayanti dan Karmini (2014) disimpulkan bahwa tingkat upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bali. Sebaliknya, hasil dari Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan oleh Fitri dan Junaidi (2016) menunjukkan bahwa meskipun upah memiliki dampak positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. Hubungan antara upah minimum dan tingkat pengangguran juga dapat dijelaskan melalui teori kekakuan upah, kekakuan upah tersebut akan menimbulkan efek kelebihan penawaran tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan akan berkurang dan akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang akan menimbulkan dampak adanya pengangguran.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di Kota, meskipun upah minimum dan upah riil naik setiap tahun, tingkat pengangguran di Kota Jawa Timur mengalami fluktuasi. Hal ini bertentangan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara teori dan hasil

penelitian sebelumnya. Maka diperlukan analisis lebih lanjut tentang pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran di Kota-kota Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengukuran tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari Kota-kota di Jawa Timur, menggunakan data enam tahun terakhir yaitu Tahun 2017-2022 dan tiga variabel yaitu Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan upah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Perkotaan Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh UMK (Upah Minimum Kota) terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur
3. Untuk menguji pengaruh Upah Riil terhadap tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun dan mengambil keputusan terkait kebijakan mengenai isu pengangguran terbuka di provinsi Jawa Timur

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Tujuan dalam penelitian ini diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur
2. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa.
3. Dengan adanya hasil penelitian ini, agar penulis bisa menyampaikan dan menyalurkan ilmu yang dimiliki kepada pembaca, khususnya terkait masalah pengangguran.